

**IMPLEMENTASI PASAL 104 PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**MUCH Z FAQU ROHMAN  
NPM 1721020059**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2021M**

**IMPLEMENTASI PASAL 104 PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**MUCH Z FAQU ROHMAN  
NPM 1721020059**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Erik R. Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2021M**

## ABSTRAK

Didasarkan kenyataan bahwa angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar seperti Bandar Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai peranan penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang jasa angkutan kota. Dishub sebagai fasilitator yaitu sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan angkutan kota serta dishub sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Mereka cenderung lebih mementingkan keuntungan semata sehingga sering terlihat angkutan kota terlihat tidak terawat, terbangkalai, dan tidak terjadwal serta izin trayek yang mati, tentu saja ini dapat merugikan masyarakat dan enggan menaiki angkutan kota.

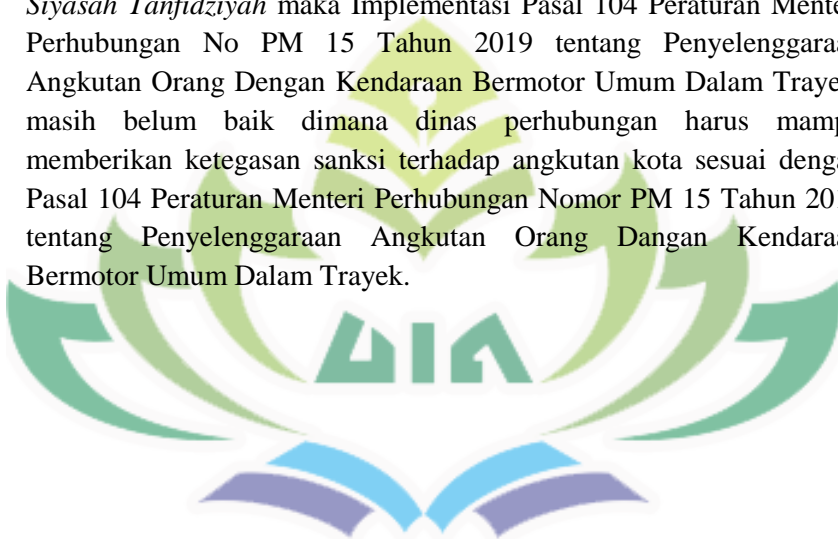
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek? dan Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian untuk memperoleh

kesimpulan. Jenis penelitian ini lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, peraturan perundang undangan, wawancara dan hasil dari penelitian.

Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek masih kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi dan mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jika dikaitkan dengan *Fiqh Siyasah* yaitu *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Tanfidziyah* maka Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, masih belum baik dimana dinas perhubungan harus mampu memberikan ketegasan sanksi terhadap angkutan kota sesuai dengan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung ,Tlp.(0721)703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**  
**Nama : Much Z Faqu Rohman**  
**NPM : 1721020059**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**  
**NIP. 196201111994031001**

**Erik R. Gumiri, M.H**  
**NIP. 199009152019031018**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung ,Tlp.(0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ **Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**” disusun oleh: **Much Z Faqu Rohman, NPM: 1721020059**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Kamis, 2 September 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si**

**Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I.,M.Sy.**

**Penguji I : Marwin, SH., MH**

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

**Penguji III : Erik R Gumari, M.H**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin., M.H.**

**NPM. 196210221993031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu `menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Maidah [5]: 8)



## PERSEMBAHAN

Teiring doa dan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Zulkarnain dan Ibu tercinta Supriyati, terima kasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terima kasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terima kasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Saudara Kandungku Nina Z Permata dewi dan suami terima kasih atas dukungan dan do'a kalian serta motivasi dan kasih sayang kalian.



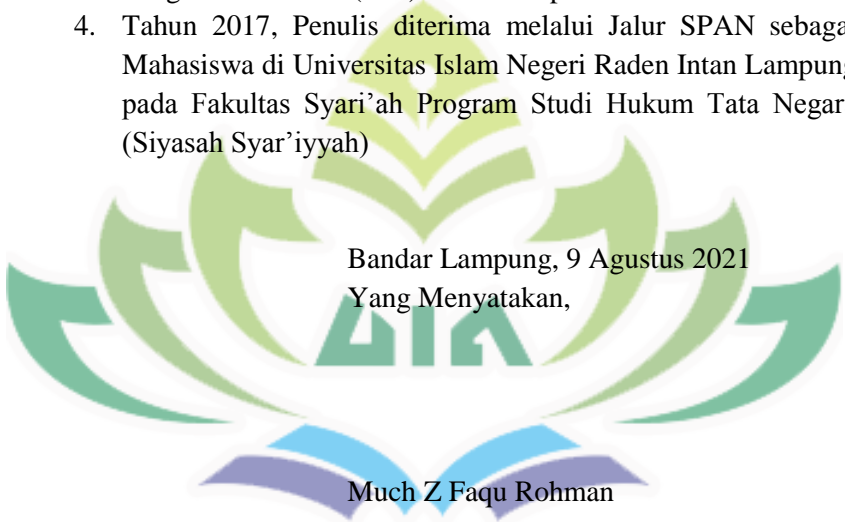


## RIWAYAT HIDUP

Much Z Faqu Rohman dilahirkan di desa Belitang pada tanggal 16 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Zulkarnain dengan Ibu Supriyati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan :

1. SDN Mesir Ilir Kec. Bahuga Way Kanan diselesaikan pada Tahun 2011
2. SMP Muhammdiyah 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Lulus pada Tahun 2017
4. Tahun 2017, Penulis diterima melalui Jalur SPAN sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



Bandar Lampung, 9 Agustus 2021  
Yang Menyatakan,

Much Z Faqu Rohman

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rasa syukur yang tak terhingga kepada yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 104 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK TERKAIT PENERTIBAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ” (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**” Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri,. M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. dan Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku ketua dan seketaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Erik R. Gumiri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepada Shafira Chika Maharani Amd, Kes yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dari awal kuliah hingga sekarang ini.
7. Teman seperjuangan Siyasah B yang telah memberikan motivasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.  
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecil nya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

*Wassalmu.alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 9 Agustus 2021  
Penulis,

Much Z Faqu Rohman



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Fiqh .....	17
2. Macam-macam Fiqh Siyasah .....	22
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	24
4. Trasnportasi Menurut Fiqh Siyasah .....	36
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 .....	39
1. Transportasi.....	39
2. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.....	40
3. Jenis-jenis Pelanggaran .....	41
4. Pola Jaringan Trayek.....	42

a. Faktor Dalam Menetapkan Trayek.....	43
b. Cara Menentukan Wilayah Angkutan Umum...	44
c. Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Trayek Angkutan Umum	47
5. Angkutan .....	47
a. Fungsi Angkutan .....	48
b. Manfaat Angkutan.....	49
c. Jenis-Jenis Angkutan.....	51
6. Angkutan Umum.....	52
a. Pengertian Angkutan Umum.....	52
b. Tujuan Angkutan Umum .....	53
c. Peranan Angkutan Umum.....	54
d. Biaya Angkutan Umum .....	56
7. Angkutan Kota .....	56
a. Tujuan Angkutan Kota.....	57
b. Karakteristik dan Pola Aktivitas Angkutan Kota.....	57
c. Ciri-ciri Pelayanan Trayek Angkutan Kota.....	58
d. Permasalahan Angkutan Kota .....	58

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	61
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Perhubungan .....	61
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan .....	63
a. Visi Dinas Perhubungan.....	63
b. Misi Dinas Perhubungan .....	63
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	64
4. Fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan .....	70
5. Tujuan Dinas Perhubungan.....	71
B. Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019.....	72

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
--

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek Terkait Penertiban Trayek Angkutan Kota Di Bandar Lampung.....	87
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek Terkait Penertiban Trayek Angkutan Kota Di Bandar Lampung .....	90

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	95
B. Rekomendasi .....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 2 Surat Izin Dinas Penanaman Modal
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 Dokumen Pendukung
Lampiran 6 Surat Keterangan Koreksi oleh Pembimbing
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian guna mempermudah dan untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi, di bawah ini penulisan akan mendefinisikan kata-kata yang terdapat dalam skripsi ini dengan judul : **Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif Fiqh Siyasah. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).**

Terdapat Beberapa Istilah di dalam judul skripsi ini dan penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.<sup>1</sup>
2. Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain. Mempunyai asal-tujuan lintasan dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.<sup>2</sup>
3. Trayek adalah pelayanan angkutan umum dari suatu tempat asal ke suatu tempat tujuan.<sup>3</sup>
4. Angkutan Kota adalah angkutan dalam suatu wilayah administrasi kota mode transportasi darat yang mengangkut

---

<sup>1</sup>Haizar Ma, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Referensi Perpustakaan, 2013), 244.

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Pasal 1

<sup>3</sup>Ludfi Djakfar *Jurnal Teknik Sipil* Vol. Iv, No. 1, April 2015, 66.

barang-barang (orang-orang) di daerah perkotaan, wilayah ibukota, kabupaten atau umum .<sup>4</sup>

5. Dinas Perhubungan merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan.<sup>5</sup>
6. Fiqh Siyasah adalah Penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilihat dari aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul :

**Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).** Tersebut adalah suatu kajian penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut Fiqh siyasah terkait penertiban trayek angkutan kota yang baik terhadap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek di bidang penggunaan jasa angkutan jalan di kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Transportasi sangat dituntut perannya dalam pembangunan suatu negara. keberhasilan dalam pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, seperti sektor transportasi sangat menentukan perannya bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik tetapi

---

<sup>4</sup>Warpaniswardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), 10.

<sup>5</sup>N Rahma, "Peranan Dinas Perhubungan. Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal. 1296-1304 | 1298.

<sup>6</sup>A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambur-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

juga mampu memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Dimana sektor transportasi harus diperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi saja tetapi juga harus memperhatikan sarana dan prasarana.

Seiring berkembangnya kota Bandar Lampung maka kebutuhan transportasi dikota meningkat maka menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang segera mungkin. Ditinjau dari aspek pergerakan masyarakat, maka bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah kendaraan baik diluar kota maupun didalam kota. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya dibidang angkutan.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka pelayanan jasa angkutan wajib menyediakan pelayanan angkutan kota. Hal ini dimaksud untuk menunjang masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Bahwa angkutan kota merupakan kebutuhan yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama pada kota-kota besar.

Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan masyarakat yang padat dengan urutan ke 15 dari 98 kota di Indonesia dan Kota Bandar Lampung merupakan kota ke 3 terbesar di Sumatera setelah Palembang dan Medan pada saat ini telah memiliki prasarana transportasi yang cukup memadai.<sup>7</sup> Bagi warga kota Bandar Lampung angkot (angkutan kota) merupakan sarana transportasi vital yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai pemberi layanan seharusnya mampu memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakatnya serta kenyamanan terhadap masyarakat.

Banyak fenomena angkutan kota yang, rute tidak teratur serta menurunkan penumpang tidak di tempat yang ditentukan, angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek serta tidak memiliki izin. hal ini merupakan masalah dalam transportasi yang ada di kota Bandar Lampung saat ini. Oleh karena itu Dinas

---

<sup>7</sup>Bps.go.id Akses 28 September 2020



Perhubungan Kota Bandar Lampung harus lah memberikan sanksi administrasi terhadap angkutan kota yang melanggar, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Terdapat Pada Pasal 104 ayat (2) yaitu:

Pasal 104 yaitu

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- 3) Pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Keberadaan angkutan umum terkhusus angkutan kota bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik, aman, nyaman, bersih serta layak jalan bagi masyarakat. Seperti hal visi dan misi nya dinas perhubungan kota Bandar Lampung adalah Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, terkendali, dan sesuai trayek. terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah Ayat 239 yaitu :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۚ كَمَا  
عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

*“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.*  
(Q.S. Al-Baqarah : 239)

Kajian ayat di atas menjelaskan bahwa keamanan saat berkendara itu sangat lah penting. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang buruknya pelayanan, keamanan serta kenyamanan dalam menggunakan angkutan kota serta tidak sesuai nya trayek angkutan kota, dinas perhubungan

tidak dapat melakukan banyak tindakan sebab Dinas Perhubungan hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan prasarana.

Wawancara hari senin tanggal 28 september 2020 tempat di halte unila. sebagai mahasiswa unila pengguna angkutan kota dengan trayek Rajabasa-Tanjung Karang. Bahwa pandangan saudara Permata Habibie angkutan di kota Bandar Lampung banyak kekurangan dan kenyamanan serta pelayanan terhadap masyarakat sebab maraknya supir tembak di kota Bandar Lampung maka supir-supir dengan usia yang belum cukup dan belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM) sudah mengendarai angkutan kota, oleh karena itu masyarakat takut akan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan. Dan banyak supir yang tidak memiliki izin trayek sesuai Peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2019. karena angkutan kota ini hanya memfokuskan untuk mendapatkan uang untuk setoran selebihnya untuk kepentingan ekonomi yang sulit pada saat ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diperoleh data bahwa masih banyak pelanggaran izin trayek angkutan kota, dalam penertiban izin trayek angkutan kota di kota Bandar Lampung, penertiban izin trayek angkutan kota menjadi salah satu cara untuk membenahi masalah ini sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung yaitu (Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali, dan memiliki izin trayek. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman, terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai). Dan dalam mewujudkan upaya visi dan misi Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung yaitu pentingnya peran Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung melaksanakan upaya untuk menertibkan kembali terhadap angkutan kota dan memberikan pembinaan kepada supir angkutan kota sesuai dalam peraturan menteri perhubungan. oleh karena penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam terhadap penertiban trayek angkutan kota dengan judul penelitian:

---

<sup>8</sup> Permata Habibie, "Mahasiswa unila pengguna angkutan kota" Wawancara *Pra riset*, September 28, 2020

Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Dalam Penelitian dengan melakukan “*Identifikasi*” dan “*Inventarisasi*” kepada masalah Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).
2. Penelitian ini membatasi masalah ruang lingkup hanya pada Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan salah satu hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini serta menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum Dalam Trayek

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penertiban izin trayek angkutan kota dalam bidang angkutan jalan di Bandar Lampung berdasarkan pasal 104 peraturan menteri perhubungan no PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya Civitas Akademik Fakultas Syariah jurusan Siyasah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk bisa mengetahui berupa masalah dalam Fiqh siyasah terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah



- c. Sebagai tugas pelaksanaan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa kebijakan baru yang dapat di implementasikan di masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pada masyarakat kota Bandar Lampung dalam penertiban izin trayek angkutan kota.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Hasil penelitian dari Natal Pangondian dan Audie L.E Rumayar tentang analisis kebutuhan angkutan umum penumpang kota Manado<sup>9</sup>. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu hitungan *load factor* (Faktor Muat) untuk mengetahui kemampuan operasional pada suatu rute, perhitungan biaya operasional kendaraan angkutan umum, dan penentuan kebutuhan jumlah armada optimal angkutan kota trayek. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti angkutan kota. Adapun perbedaan dengan penilinan ini sangat berbeda, karna penelitian ini meneliti tentang biaya operasional dan kebutuhan armada angkutan umum, sedangkan penelitian ini meneliti tentang penertiban izin trayek yang terdapat pada pasal 104 sesuai dengan judul penulis Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyasaah*, dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kota Bandar Lampung. Penelitian ini dengan penelitian penulis sangat berbeda.
2. Hasil penelitian dari Tri Rusanti tentang dampak Penertiban Trayek Angkutan Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>9</sup> Natal Pangondian siangian junior, "Analilsis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Mando" *Jurnal Sipil Statik*, Vol 4, No 6, 2016

dalam Perspektif Ekonomi Islam<sup>10</sup>. Adapun hasil penelitian dari Tri Rusanti tentang Trayek Angkutan Umum, yaitu tentang penertiban trayek pada supir angkutan pedesaan yaitu terjadi nya penurunan kesejahteraan pada pada supir angkutan desa, akibat penertiban trayek angkutan umum. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Angkutan Umum, dan data yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara. Adapun perbedaan dari penelitian ini objek yang diteliti yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Dengan penelitian penulis yaitu Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Terkait Penertiban Trayek Angkutan Kota.

3. Hasil penelitian dari tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Terkait Penertiban Trayek Angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek di Kota Pariaman<sup>11</sup>. persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Terkait Penertiban Trayek, perbedaan dari penelitian penulis adalah lebih memfokuskan penelitian tentang bagaimana Implementasi Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perspektif *Fiqh Siyash*

---

<sup>10</sup> Rusanti, "Dampak Penertiban Trayek Angkutan Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Disertasi, UIN Raden Intan, 2017)

<sup>11</sup> Dian Fakhri, "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Terkait Penertiban Trayek Angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek di Kota Pariaman" (Disertasi, Universitas Andalas, 2019)

dengan penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini penelitian Deskriptif yaitu digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif, dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif ini digunakan untuk meneliti wacana pada umumnya dimulai dengan mengklasifikasi objek penelitian, kemudian hasil klasifikasi itu dianalisis secara deskriptif.<sup>13</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh peneliti sendiri dari objek yang diteliti melalui pengamatan, wawancara terhadap dinas perhubungan dan supir angkutan kota<sup>14</sup>

Data yang didapat berupa gambaran langsung dari penelitian yang langsung terjun ke lapangan dan juga berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada

---

<sup>12</sup>Susiadi As., *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

<sup>13</sup>Junaiyah H.M Dan E. Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 113.

<sup>14</sup>Moh. Pembundu Tika, *Metodelogi Riset Bisni*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

beberapa pihak dinas perhubungan kota Bandar Lampung dan juga supir angkutan kota.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari Sumber-Sumber yang telah ada.<sup>15</sup> Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Sumber data yang diperoleh dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Sumber hukum primer terdiri dari al-quran, hadist, tafsir, syara dan peraturan perundang-undangan
- 2) Sumber hukum sekunder terdiri dari buku fiqh siyasah
- 3) Sumber hukum tersier terdiri dari Ensiklopedi, Artikel, jurnal, kamus

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah gabungan elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena dipandang sebuah penelitian.<sup>16</sup> Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10-15%.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

<sup>16</sup> Sudermayati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 34.

<sup>17</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 112.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah : Terdiri dari supir atau pengemudi angkutan kota dan pegawai dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dengan Populasi berjumlah 100 orang maka pengambilan sampel 10-15% yang sesuai dengan persyaratan untuk dijadikan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sample yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah “*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.<sup>18</sup> *Purposive Sampling* juga disebut *Judgemental sampling* yaitu mengambil berdasarkan penilaian (*Judgment*) penelitian mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk di jadikan sample :

- 1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung atau yang memahami tentang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- 2) Kepala bidang angkutan jalan dan perhubungan laut atau pegawai dinas perhubungan
- 3) Kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan
- 4) Supir angkutan kota yang sudah lama menjadi pengemudi (lebih 20 tahun) atau berkerja sehari hari sebagai pengemudi angkutan kota di kota Bandar Lampung.

Oleh karena itu, penelitian harus mempunyai latar belakang tertentu mengenai sampel yang benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sample pada penelitian adalah: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala bidang angkutan jalan dan perhubungan laut, Kepala bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan, Supir Angkot. berjumlah 10

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 85.



orang yang dilakukan penelitian di terminal Kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini maka pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.<sup>19</sup> Observasi yang akan dilakukan didinas perhubungan selama 30 hari yaitu mengamati kegiatan angkutan kota dan supir angkutan kota di kota Bandar Lampung

##### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>20</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diamati di tempat penelitian di Dinas perhubungan kota Bandar Lampung dan juga di jalan. salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan foto, arsip, mikrofilm, *Compact Disk*, dan *Hardisk*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Elvinaro Ardianto., *Metodelogi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 165.

<sup>20</sup> *Ibid*, 163.

<sup>21</sup> *Ibid*, 167.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap maka selanjutnya menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu peran dinas perhubungan kota Bandar Lampung terkait penertiban izin trayek angkutan kota di bidang angkutan jalan yang dikaji menggunakan. Metode deskriptif analitis berdasarkan pasal 104 peraturan menteri perhubungan no PM 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, pembuktian dan diakhir dengan kesimpulan metode induktif ini dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat didalam data.<sup>22</sup>

Hasil analisisnya deskriptif analitis dituangkan dalam bab-bab berikutnya, yang telah dirumuskan dalam sistematika dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

#### a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup> Susiadi As., *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 4.

b. BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini memuat uraian mengenai teori dan referensi yang menjadi landasan penunjang penelitian ini yaitu meliputi pengertian pola jaringan (trayek), angkutan umum dan orang, fungsi angkutan, manfaat pengangkutan dan ketentuan Fiqh Siyasah terhadap penertiban trayek angkutan kota.

c. BAB III Deskripsi objek penelitian

Bab ketiga adalah gambaran umum onbjek serta penyajian fakta dan data penelitian yaitu meliputi : hasil penelitian yang meliputi sejarah dinas perhubungan, visi dan misi dinas perhubungan, pemaparan data angkutan kota, pemaparan struktur organisasi, potret angkutan kota, dan hasil wawancara.

d. BAB IV Analisis penelitian

bab keempat berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian mengenai pembahasan : Implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terkait penertiban trayek angkutan kota di bandar lampung serta tijauan fiqh siyasah terhadap dinas perhubungan

e. BAB V Penutup

Bab kelima berisi kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Fiqh

Terdapat dua kata berbahasa arab dalam pembahasan ini yaitu *fiqh* dan *siyasah*, pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang pas mengenai pengertian *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing tentang *fiqh siyasah* dari masing-masing kata serta dari berbagai segi bahasa dan istilahnya. Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia<sup>23</sup>

Kata *Fiqh* merupakan kata yang berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidi*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat digunakan dan diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah).

*Fiqh* juga dapat di ibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan, namun *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* memiliki sifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dapat dicapai melalui suatu

---

<sup>23</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 21.



ijtihad yang dilakukan oleh para Mujtahid. Sedangkan ilmu *fiqh* ialah ilmu yang bertugas untuk menentukan dan menguraikan suatu norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang direkam dan dikumpulkan menjadi kitab-kitab hadist. Dengan kata lain bahwa ilmu *fiqh* adalah suatu ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalunya dan yang berkewajiban untuk melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.<sup>24</sup>

Istilah *fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>25</sup>

Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata *Sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian *Siyasah* mengisyaratkan tujuan nya adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.<sup>26</sup>

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalm Ibn aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan

---

<sup>24</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke19, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48-50.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18.

<sup>26</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49.

lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>27</sup>

Secara terminologi *siyasah* berarti : hukum-hukum *syara* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan serta ppenegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *Ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *Maslahat* dan jauh dari *Nafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al-qur'an dan as-sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. *Ta'dzir*, ancaman dan hukuman.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-seluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kaencana, 2007), 28.

<sup>28</sup> Ibid, 51.

<sup>29</sup> Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

Sedangkan makna *Al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *Daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang di gunakan dalam aturanb-aturan intern tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampak kekuasaan<sup>30</sup>.
- c. Adapula istilah *Al-siyasah Al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna suatu perkara. Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai *al-siyasah syar'iyah al-syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyari'atkan Rasulullah Saw dan tidak pula diturunkan melalui wahyu.

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama metode yang mengedepankan sisi ahlak dan sosial. Kedua metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikay *siyasah syar'iyah* yaitu :

---

<sup>30</sup> Beliau Adalah Ali Bin 'Aqil Bin Muhammad Abu Al-Wafa' Al-Zhihari, Salah Seorang Tokoh Terkenal Satu-Satunya Di Jamanya, Alim, Penulis Cerdas. Beliau Menulis Buku Yang Membatah Mereka. Dalam Rapung Samuddin, 50.

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal<sup>31</sup>.

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*adam al-haraj*).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jaib al-mashalih wa daff' al-mafasid*)<sup>32</sup>.

*Fiqh siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *siyasah* adalah pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2001), 4.

<sup>32</sup>Ibid, 7.

<sup>33</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Auntsitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet 2, 3.

## 2. Macam-macam Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. Siyasah Qadla'iyyah (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan)
- e. Siyasah Idariyyah (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Siyasah Qadla'iyyah (Peradilan)
- b. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara)
- c. Siyasah Maliyah (Keuangan atau Ekonomi)
- d. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan

---

<sup>34</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006),

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>36</sup> Ibn Taimiyyah, Al-Siyasah Al-Syar'iyat fi islah al-Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat, (Beirut, 2003), 4.



yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka<sup>37</sup>. Dan Abdul Wahhab Khali'af mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Siyasah Qadla'iyyah (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. Siyasah Maliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa Syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.<sup>39</sup> Dan Hasby membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:<sup>40</sup>

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

---

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyyat*, Dar Al-Anshor, (Qahirat, 2001), 5.

<sup>38</sup> Ibid, 67.

<sup>39</sup> Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Madah, 2003), 28.

<sup>40</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan).

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 bidang saja. Pertama, bidang *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai

administrasi yang sesuai syariat, dan siyasah *tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.<sup>41</sup>

a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya.
- 3) Persoalan *bai'at* (pengangkatan atau pelantikan seorang pemimpin).
- 4) Persoalan *waliyatul ahdi* (pemberian jabatan kepada keluarganya).
- 5) Persoalan perwakilan.
- 6) Persoalan *ahlul halil wal aqdi* (memilih atau memutuskan pemimpin melalui musyawarah).
- 7) Persoalan *wizarah* (membantu presiden dalam bidang tertentu) dan perbandingannya<sup>42</sup>.

b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menunangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi :

- 1) Persoalan internasional.
- 2) Territorial.
- 3) Nasional dalam *fiqh islam*.
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh islam*.

---

<sup>41</sup>Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. (Yogyakarta: Ombak. 2014), 43.

<sup>42</sup> Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyasah*, 32.

- 5) Masalah penyerahan penjahat.
  - 6) Masalah pengasingan dan pengusiran.
  - 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara.
  - 8) Hubungan muslim dan non muslim<sup>43</sup>.
- c. *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perpektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Dalam ruang lingkup pembahasannya :
- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
  - 2) Pengeluaran dan belanja negara
  - 3) *Baitul maal* (tempat menyimpan harta) dan fungsinya<sup>44</sup>.
- d. *Fiqh siyasah harbiyah* pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang.
- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam islam.
  - 2) Masalah mobiltas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan.
  - 3) Tawanan Perang, harta peperangan
  - 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian<sup>45</sup>.

Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan penting, kecuali itu prinsip keadilan diabaikan.

*Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang

---

<sup>43</sup> Ibid, 44.

<sup>44</sup> Suyuthi Pulungan, 44.

<sup>45</sup> Ibid, 45.

bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>46</sup>

Metode yang digunakan dalam fiqh siyasah ini tidaklah berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan metode kaidah fiqh. Kedua metode tersebut menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk dihadapkan dengan masalah-masalah yang timbul, metode-metode qiyas, istihsan, 'uruf, maslahat mursalah, istishab, yang dikenal dengan istilah *mashadir al tasyri'* al islam fi ma la nashasha fih (sumber penetapan hukum islam yang tidak berasal dari nash) dan kaidah-kaidah fiqh. Metode tersebut memberikan kebebasan berfikir dan kemudahan bagi penggunaanya, tapi harus merujuk kepadadalil-dalil kulli (umum) yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah *dusturiyah* dan *tanfidziyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sedah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah *dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntun oleh hal ihwal kekenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Dusturiyah* mencangkupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi :

- a. Persoalan dan ruangan lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

---

<sup>46</sup> Ibnu Syarif, Mugar Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>47</sup> Ibid, 47.

- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.<sup>48</sup>

Fiqh dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun Hadist, maqasidu syariah, dan mangat ajarat Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika fiqh siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.

*Siyasah tanfidziyah* adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-kharaj* (Dewan Pajak),

---

<sup>48</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) Cet. 1, 276.

<sup>49</sup> H.A. Djazuli, *Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.



*Diwan al-ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *Diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat Keuangan), dan sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara al-maududi menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.<sup>50</sup>

Berdasarkan al-quran dan as-sunah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran, yaitu

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً

يُرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

*“Bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka*

<sup>50</sup> Abu a'la Al-maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993) Cet II, 247.

*tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak menepati perjanjian)” (QS: At-Taubah : 8)*

Selain dari itu, imamah juga dapat diartikan gelar yang bisa diberikan kepada seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan social, keilmuan kegamaan atau suatu aliran pemikiran dan ideologi politik. Kekuasaan imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu. Pertama, bersifat syar’i dan Kedua bersifat Siyasi.

Dalam pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu dan untuk ditaati, misalnya kewajiban rakyat seperti membantu dan mentaati pemimpin nya seperti yang terdapat dalam surat di Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata: “Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.”<sup>51</sup>

Islam sebagai agama yang memiliki amal dan sangat wajar apabila meletakkan suatu *focus of interest* nya pada kewajiban. Hak sendiri akan datang apabila kewajiban sudah dikerjakan dengan cara yang baik. Ternyata tidak ada kesepakatan tentang kewajiban menurut para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh yang akan dikemukakan menurut Al-mawardi, yaitu:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah di sepakati oleh ulama salaf.

---

<sup>51</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005), 83.

- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian orang-orang yang behak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dan membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: Menyebarkan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu

keduniawian.<sup>52</sup> Hal yang terpenting Ulil Amri harus selalu menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak hidup, hak mendapatkan penghasilan yang layak, dan hak beragama dan lain-lain.

Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libya, Irak (Konstitusi 1990) Mauritania dan Malaysia menyebutkan bahwa islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan bahwa dalam pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan pada pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah *Ahlu-halli Wa al-aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik<sup>53</sup>. Adapun yang disebut dengan adanya dasar *Ahlu-halli Wa al-aqdi* dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawasan atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, tugasnya hanya terbatas oleh dua hal yaitu. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diataranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintah<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi, 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition. Internasional Journal of Business and Sosial Science. Vol. 3 No. 20, 14.*

<sup>53</sup> Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis dinul Islam*, (Bandung: kencana, 2006), 208.

<sup>54</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 87.

Ulil Amri adalah istilah syar'i yang terdapat didalam Al-Qur'an. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka. Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-halli Wa al-aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokratif pemerintah maupun lainnya.

Walupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman<sup>55</sup>.

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (pemimpin) :

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuatan bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseturuan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang teranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.

---

<sup>55</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), 74.

- 3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4) Menegakan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin, agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-nya atas seluruh agama,
- 7) Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan. Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan.
- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkanya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluaranya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.



- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasihat.

Menurut Al-mawardi secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara yang terpilih yaitu :

- a) Memelihara agama.
- b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
- c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman.
- d) Menegakan hudud.
- e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh.
- f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak.
- g) Memungut harta Fa'i atau zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- h) Membagi-bagikan kepada yang berhak.
- i) Menyampaikan amanah.
- j) Memeperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahanya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Al-mawardi, *Adab al-dunyab wa al-din*, terjemahan Ibrahim Syu'aib, *Etika Agama dan Dunia*, (Jakarta:Granit, 2004), 100-101

#### 4. Fiqh Siyasaah Tentang Transportasi

Transportasi pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian, hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun pada saat itu alat transportasi utama antar kampung dan kota adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda. Manusia menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya mengendarai kuda atau kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat-alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang diciptakan Allah untuk manusia agar dapat merekendarai. Terdapat pada Q.S Yasin ayat 41-42 yang berbunyi:

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ

مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

*Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu[1268].*

*[1268] Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya. (Q.S Yasin: 41-42)*

Dengan banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang ada sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda dan keledai, maka pada abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang.

Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini pada abad 14 yang lalu, ketika itu manusia belum menegerti dengan teknologi, mereka hanya mengenal unta, kuda dan keledai sebagai alat transportasi utama didaratan dan ini masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian hingga awal abad ke 20. Disebutkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 8 yang berbunyi :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

*Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.(Q.S An-Nahl : 8)*

*[820] Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai.*

Allah memuliakan dan memanjakan manusia di dunia ini dengan berbagai fasilitas. Namun pada kenyataannya sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah. Manusia selalu menuntut apa yang menjadi haknya, tapi lupa memenuhi kewajibannya terhadap Allah yang telah memenuhi fasilitas dan kebutuhan hidupnya di bumi ini. Dengan kemajuan teknologi yang telah dikuasai, manusia mampu membuat kendaraan bermotor, mobil, bahkan pesawat terbang, perjalanan yang semula ditempuh sehari-hari dengan berjalan kaki sekarang bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dengan kendaraan.

Perjalanan antar kota dan negara yang dahulu membutuhkan waktu berbulan bulan, jumlah manusia semakin banyak dan mobilitas semakin tinggi. Pemegang otoritas (pemerintah atau lembaga negara) merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola aset publik, baik berupa barang maupun jasa, menjaga dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat<sup>57</sup>. Transportasi menjadi salah

---

<sup>57</sup> Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 8.

sau fokus umat muslim. Salah satu contoh pembangun yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur. Kota Kufah dan Basrah dibangun atas perintahnya. Selain itu, ketika pembangunan kota ini tengah berlangsung. Khalifah memberikan perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan meletakkan pembangunan masjid dipusat kota. Tindakan Umar yang paling terkenal di Mesir adalah mengizinkan Amr bin Ash untuk menggali terusan al-fustat ibukota Mesir, yang terletak didekat Kairo dengan pelabuhan Suez. Penggalan terusan yang dimaksud adalah saluran yang dibuka setelah penaklukan Mesir, terusan ini disebut terusan Amirul Mukmin dan menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, laut merah, dan India. Tujuan penggalian ini untuk mengatasi kekurangan pangan di Madinah.

Pemikir muslim, Ibnu Khaldun berpendapat mengenai pentingnya transportasi jika jarak antara negeri sudah dekat dan jalan sudah dilalui dengan aman, akan meningkatlah transportasi dan harganya pun akan murah, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat<sup>58</sup>.

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan hidup bagi pembangunan suatu daerah/negara juga menjadi tujuan bagi setiap manusia. Fasilitas umum merupakan bagian dari kepemilikan umum termasuk didalamnya adalah transportasi. Pemilikan umum adalah hak yang diberikan oleh syara kepada komunitas/umat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama.

---

<sup>58</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008), 290-295.

## **B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek**

Peraturan menteri perhubungan ini merupakan peraturan yang mencabut Peraturan No 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Peraturan menteri perhubungan ini diciptakan untuk mengatur secara rinci dan lebih mendalam mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

### **1. Transportasi**

Transportasi adalah sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau sering dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen.

Peran transportasi adalah sebagai sarana penghubung, mendekatkan, menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi dalam kehidupan manusia dan perekonomian dapat tercermin bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, transportasi adalah setua dengan peradaban manusia, transportasi merupakan faktor pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah, transportasi merupakan *leading sector* (sektor pendahulu, yang harus disediakan lebih dahulu dalam menunjang pembangunan, transportasi menciptakan penghematan perjalanan waktu yang signifikan<sup>59</sup>.

Fungsi transportasi sebagai penunjang (*serving facility*) dimaksudkan jasa transportasi untuk melayani pengembangan sektor-sektor lain yaitu : sektor pertanian, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi,

---

<sup>59</sup> Sakti Adji Sasmita, *Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 7.

dan lainnya. Transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan yang dimaksudkan bahwa pengadaan/pembangunan fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi diharapkan dapat membantu pembukaan keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah-daerah serta daerah perbatasan.

## **2. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek merupakan angkutan yang dilayani dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang mengantar dari satu tempat ketempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan/jalur trayek, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran. Sedangkan trayek adalah lintasan atau jalur kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap berjadwal dan tidak berjadwal, dan jaringan izin trayek merupakan kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, sebagaimana yang tertera pada pasal 104 terdapat sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan atau pengemudi angkutan umum yaitu:

### **Pasal 104 yaitu:**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek



- c. Pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

### **3. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Perusahaan Atau Pengemudi Angkutan Umum Dalam Trayek Yaitu:**

1. Pengurangan dan penambahan identitas kendaraan
2. Tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan
3. Menggunakan kartu pengawasan ganda
4. Mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin trayek penyelenggaraannya
5. Memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
6. Mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku uji kendaraan, dan tanda uji kendaraan bermotor
7. Tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang
8. Memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan
9. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek penyelenggaraan yang dimiliki
10. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan
11. Memalsukan dokumen perjalanan yang sah

12. Melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa<sup>60</sup>.

#### 4. Pola Jaringan (Trayek)

Pola jaringan (trayek) adalah lintasan kendaraan bermotor angkutan umum untuk untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus dengan mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Memiliki izin trayek untuk melayani pergerakan moda transportasi mengangkut barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>61</sup>

Trayek angkutan umum biasanya ditempatkan dilokasi dimanapun memang diperkirakan ada calon penumpang yang akan dilayani. Dalam suatu kota umumnya trayek yang melayani masyarakat lebih dari satu maka ditinjau secara keseluruhan akan ada suatu sistem jaringan trayek yaitu sekumpulan trayek yang bersama-sama melayani kebutuhan umum masyarakat. Dalam sistem jaringan tersebut akan terdapat titik-titik dimana akan terjadi pertemuan dua rute atau lebih. Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan akan terjadi penggantian rute, karena pada kenyataannya seorang penumpang tidak selamanya dapat menggunakan hanya satu rute untuk perjalanannya dari satu tempat asal ke tempat tujuannya.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain dengan mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Angkutan Bermotor Umum Dalam Trayek

<sup>61</sup> Sakti Adji Sasmita. *Transportasi Komprehensif dan Multimoda*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 99.

kesatuna dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum telah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK 687/AJ.206/DRDJ/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

**a. Faktor Yang Digunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menetapkan Trayek Adalah Sebagai Berikut:**

**1) Pola Tata Guna Tanah**

Lintasan trayek diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Lokasi yang potensial menjadi tujuan bepergian diusahakan menjadi prioritas pelayanan. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan.

**2) Pola Pergerakan Penumpang Angkutan Umum**

Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti pola pergerakan penumpang angkutan penumpang sehingga tercipta pergerakan yang lebih efisien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan.

**3) Kepadatan Penduduk**

Salah satu factor menjadi prioritas angkutan umum adalah wilayah kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan sedekat mungkin menjangkau wilayah itu.

#### 4) Daerah Pelayanan

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal ini sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.

#### 5) Karakteristik Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan akan menentukan pola pelayanan trayek angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringan jalan yang ada.

### **b. Cara Menentukan Wilayah Penumpang Angkutan Umum Yaitu Sebagai Berikut:**

1. Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota dapat ditentukan setelah diketahui batas-batas wilayah terbangun.
2. Batas wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota/perkotaan ditentukan oleh hal-hal berikut:
  - a. Batas Wilayah Terbangun Kota/perkotaan
    - 1) Wilayah terbangun kota/perkotaan dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat peta pembangunan lahan suatu kota dan daerah sekitarnya atau dengan menggunakan foto udara.
    - 2) Wilayah terbangun kota adalah wilayah kota/perkotaan yang menggunakan lahannya didominasi oleh bangunan-bangunan yang membentuk suatu kesatuan.
3. Pelayanan Angkutan Umum Penumpang Kota Untuk menentukan titik terjauh pelayanan angkutan umum penumpang kota, dilakukan beberapa cara yaitu:

- a. Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahan-kelurahan yang terletak disekitar batas wilayah terbangun kota;
  - b. Menghitung jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusaha angkutan penumpang umum;
  - c. Menentukan batas wilayah pelayanan kota dengan menghubungkan titik-titik terluas, terluar tersebut diatas.
4. Struktur Jaringan Jalan
- a. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dapat dilakukan perencanaan atau studi yang banyak melibatkan aspek serta pengamatan guna mencapai pemenuhan pelayanan angkutan penumpang umum yang optimal.
  - b. Proses perencanaan harus mengacu pada kebijaksanaan angkutan umum berikut:
    - 1) Peraturan yang sudah adadan berlaku;
    - 2) Kebijakan pemerintah daerah khususnyadalam sektorpublik;
    - 3) Ketetapanwilayah operasi angkutan bus kota dan interaksinya dengan jenis angkutan yang lalu.
  - c. Tahapan proses perencanaan meliputi:
    - 1) Analisa permintaan. Analisa permintaan dilakukan dengan cara:
    - 2) Menelaah rencana pengembangan kota, inventarisasi tata guna tanah dan aktivitas ekonomi wilayah perkotaan;
    - 3) Menelaah data penduduk, inventarisasi data perjalanan yang termasuk di dalamnya asal tujuan perjalanan, dimaksud perjalanan pemilihan moda angkutan (modasplit) dan jumlah penduduk serta penyebarannya.

- 4) Menelaah pertumbuhan penumpang masa lalu dan pertumbuhan beberapa parameter lain, misalnya pemilik kendaraan dan pendapatan.
5. Analisis Kinerja Rute dan Operasi. Analisa ini mengkaji beberapa parameter sebagai berikut:
  - a) Faktor muat (load factor)
  - b) Jumlah penumpang yang diangkut
  - c) Waktu antara (headway)
  - d) Waktu tunggu penumpang
  - e) Kecepatan perjalanan
  - f) Sebab-sebab kelambatan
  - g) Ketersediaan angkutan, dan Tingkat konsumsi bahan bakar.
6. Penyusunan Rencana
  - a) Rencana pengembangan angkutan umum didasarkan pada permintaan dan kebijakan yang berlaku yaitu, Penetapan rute(jumlah dan kepadatan), Pelayanan operasi (jumlah armada, waktu antara, kecepatan, jam operasi) tiap rute.
  - b) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sesuai dengan permintaan dan peraturan yang ditentukan yaitu Kebutuhan tempat henti, kebutuhan tempat pemantauan, Kelembagaan dan peraturan, Untuk menjamin berjalannya sistem angkutan umum bus kota yang, baik diperlukan peraturan dan kelembagaan yang sesuai, meliputi sistem organisasi dan prosedur perizinan.



**c. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Trayek Angkutan Umum Terdiri dari :**

**1. Trayek Utama**

Trayek utama memiliki jadwal yang tetap dan tertur. Trayek ini melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan cir perjalanan ulang alik secara tetap.

**2. Trayek Cabang**

Sama halnya dengan sistem pengoperasian pada trayek utama namun trayek cabang ini beroperasi pada kawasan penduduk, antara kawasan pendukung dan pemukiman.

**3. Trayek Ranting**

Trayek ranting tidak memiliki jadwal yang tetap. Wilayah pelayanannya pada kawasan pemukiman penduduk. Sedangkan moda yang digunakan berupa mobil penumpang.

**4. Trayek Langsung**

Trayek langsung memiliki jadwal yang tetap. Melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan pemukiman, dan berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk angkutan kota menaik dan menurunkan penumpang<sup>62</sup>.

**5. Angkutan**

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam suatu daerah provinsi

---

<sup>62</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Trayek Angkutan Umum

dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang dalam trayek. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan bisnis yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah perangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:<sup>63</sup>

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas yang dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi manusia.

#### **a. Fungsi Angkutan**

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului pembangunan proyek pertambangan batu bara atau proyek perkebunan kelapa sawit. Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan dari pada pembangunan pabrik pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi. Jika kegiatan-kegiatan ekonomi telah berjalan, jasa angkutan perlu tersedia untuk menunjang kegiatan-

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

kegiatan tersebut. demikianlah fungsi pengangkutan tersebut menunjang pembangunan, merangsang dan melayani perkembangan ekonomi.

## **b. Manfaat Angkutan**

Pengangkutan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. oleh karena itu, manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan.<sup>64</sup>

### **a. Manfaat ekonomi**

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi., distribusi dan pertukaran kekayaan yang semuanya bisa diperoleh dan berguna. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang maupun barang. Dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jugalah hasil produksi di bawa ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhannya, seperti pasar, rumah sakit, pusat rekreasi, dan lain-lainnya.

### **b. Manfaat sosial**

Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat dan berusaha hidup selaras satu sama lain dan setiap orang harus menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Bentuk kemsyarakatan ini dapat bersifat resmi, seperti hubungan dengan lembaga pemerintahan maupun

---

<sup>64</sup> M. Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 19-24.

swasta, dan dapat pula bersifat tidak resmi, seperti hubungan dengan keluarga dan lain-lain. untuk kepentingan hubungan sosial seperti ini, pengangkutan sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan antara lain pelayanan untuk perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk rekreasi, perluasan jangkauan perjalanan sosial, pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja, bantuan dalam memperluas kota atau memancarkan pendudukan menjadi kelompok yang lebih kecil.

c. Manfaat politis dan kemanan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah ribuan km, serta merupakan Negara maritim. Keadaan demikian mengakibatkan pengangkutan menduduki tempat yang teramat penting dilihat dari kacamata politik. Schumer menyebutkan bebrapa manfaat politis yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi
- 2) Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu Negara
- 3) Kemanan Negara terhadap serangan dari luar yang tidak dikehendaki mungkin sekali bergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi segala daya (kemampuan dan ketahanan) nasional serta memungkinkan perpindahan pasukan perang selama masa perang
- 4) Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan Negara memindahkan san

mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana alam

d. Manfaat kewilayahan

Pada bagian terdahulu telah diungkapkan bahwa barang atau orang berpindah atau bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan karena daya tarik nisbi di tempat tujuan dan atau kebutuhan mengatasi rintangan alami. Ini berarti ada kesenjangan jarak antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk mengatasi kesenjangan inilah dibutuhkan pengangkutan maupun komunikasi. Bagi daerah perkotaan, pengangkutan memegang peranan yang cukup menentukan. Kota dapat ditandai antara lain, dengan melihat kondisi pengangkutnya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain menverminkan keteraturan kota, juga melancarkan kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar dan lain-lain.

**c. Jenis – Jenis Angkutan**

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri dari :

- a. Angkutan lintas batas Negara. Yang dimaksud dengan angkutan lintas batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain meliwati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
- b. Angkutan antarkota antarprovinsi. Yang dimaksud dengan angkutan antarkota antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
- c. Angkutan antarkota dalam provinsi. Yang dimaksud dengan angkutan antarkota dalam provinsi adalah

angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

- d. Angkutan perkotaan. Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan
- e. Perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa: kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- f. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

## **6. Angkutan Umum**

### **a. Pengertian Angkutan Umum**

Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan jalan pada bab 1 ketentuan umum mendefinisikan kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang bermotor disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya<sup>65</sup>. PP Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan pada bab 1 ketentuan umum mendefinisikan

- (1) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- (2) Mobil penumpang umum (MPU) adalah mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum disebut mobil penumpang umum.

Sistem angkutan penumpang dapat dikelompokkan menurut penggunaan dan cara pengoperasiannya yaitu :

- (1) Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan untuk keperluan pribadi pemilik.
- (2) Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu.

Terdapat dua sistem pemakaian angkutan umum yaitu :

- (2) Sistem sewa : kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun penyewa, dalam hal ini tidak ada trayek dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai, sistem ini sering disebut sebagai “*demand responsive system*” karena penggunaannya yang tergantung dengan adanya permintaan.
- (3) Sistem penggunaan bersama : kendaraan dipersiapkan oleh operator dengan rute dan jadwal yang ditetapkan.

#### **b. Tujuan Angkutan Umum**

Tujuan mendasar dari keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik meliputi pelayanan yang aman, dapat dipercaya, teratur, cepat, murah, nyaman, mudah diperoleh, menyenangkan, dan bermatabat<sup>67</sup>. Dinegara berkembang kebutuhan angkutan umum meningkat dengan pesat, orang yang mampu membeli kendaraan, pribadi hanya sebagian kecil, sehingga banyak orang yang bergantung pada keberadaan angkutan umum. Dan kalau pun setiap orang mampu

---

<sup>67</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB Bandung, 2002), 55.



membeli kendaraan pribadi, hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan angkutan khusus nya diwilayah perkotaan, karena jaringan jalan yang ada akan dipenuhi kendaraan-kendaraan yang bergerak, akhirnya akan bergerak sangat lambat atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Angkutan umum penumpang jalan raya dalam kota memiliki peran yang penting karena merupakan angkutan yang relatif murah, fleksibel dan menggunakan ruang jalan yang ada secara efisien.

### c. Peranan Angkutan Umum

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah kota yang berada pada jalur sistem angkutan. Sejarah perkembangan sejumlah kota besar di dunia menjadi bukti besarnya peranan angkutan terhadap perkembangan kota yang bersangkutan.

Transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktivitas kota. Dalam perencanaan wilayah atau pun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak dapat diabaikan karena memiliki peranana yang penting yaitu:

#### (1) Melayani mobiltas kepentingan masyarakat

Peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan perkotaan/pedesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi) maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi (angkutan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi). Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah perannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi dan pengembangan wilayah.

## (2) Pengendalian lalu lintas'

Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka afisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Selain itu jumlah kendaraan yang melintas dapat dikurangi, sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, pengelola yang baik mampu menarik orang untuk lebih menggunakan angkutan umum dari pada menggunakan kendaraan pribadi menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan lalu lintas.

## (3) Pengehematan energi

Pengelolaan angkutan umum berkaitan dengan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Telah diketahui bahwa cadangan energi bahan bakar minyak dunia terbatas. Untuk itu layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka sejumlah besar kendaraan dapat “dikandangan” selama waktu tertentu.

## (4) Pengembangan wilayah

Berkaitan dengan pengembangan wilayah, angkutan umum juga berperan dalam menjunjung interaksi sosial budaya masyarakat, pemerataan pembangunan daerah beserta hasil-hasilnya, didukung oleh sistem pengangkutan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kondisi setempat.

#### **d. Biaya Angkutan Umum**

Biaya angkutan umum ditinjau dari sudut pandang masing-masing pihak yang terkait dalam sistem angkutan yaitu pemakaian jasa angkutan, perusahaan pangangkutan, pemerintah, daerah, dan pihak pihak diluar pemakaian jasa angkutan.

1. Pemakaian jasa angkutan memandang ongkos sebagai harga yang dibayar untuk mendapatkan jasa angkutan, waktu yang dikorbankan untuk kegiatan transportasi, ketidak nikmatan dalam perjalanan, dan kehilangan serta kerusakan dalam pengiriman barang. Konsep ini muncul dari pengertian pengorbanan yang dikeluarkan untuk melakukan perpindahan dengan harapan mendapatkan kepuasan dalam perjalanan.
2. Perusahaan pangangkutan memandang ongkos angkutan sebagai ongkos langsung yang dikeluarkan untuk investasi, operasi, dan pemeliharaan fasilitas transportasi.
3. Pemerintah memandang ongkos angkutan sebagai pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan transportasi.
4. Daerah memandang ongkos sebagai pengorbanan tidak langsung karena adanya fasilitas transportasi.
5. Pihak-pihak diluar pemakai jasa angkutan memandang ongkos sebagai pengorbanan karena perubahan nilai tanah yang digunakan untuk jaringan transportasi dan penurunan kehidupan lingkungan.

#### **7. Angkutan Kota**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada bab 1 ketentuan umum mendefinisikan angkutan perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang

umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang-alik (Komuter)<sup>68</sup>.

Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran yang baik disini dilihat dari kinerja operasi angkutan kota dan kualitas pelayanan angkutan kota. Untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi dalam memberikan pelayanan jasa transportasi kepada penumpang, maka perlu diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi indikator kinerja operasional dan kualitas pelayanannya<sup>69</sup>.

Angkutan kota berupa angkutan massal atau mass rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan, Mobil penumpang umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi batasan umur angkutan kota yaitu hanya berlaku selama 8 tahun.

#### **b. Tujuan Angkutan Kota**

Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik (aman, cepat, murah, dan nyaman) dan layak bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkutan dapat dibebankan kepada banyak penumpang, karena sifat massal itu juga maka diperlukan adanya kesamaan antara para penumpang berkenaan asal dan tujuan.

#### **c. Karakteristik dan Pola Aktivitas Angkutan Kota**

Angkutan umum kota beroperasi menurut trayek kota yang sudah ditentukan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993, trayek kota

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

<sup>69</sup> Muhammad Syaiful Buamona, "Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate" Jurnal unsrat, Vol 2, No 3, 2005

seluruhnya berada dalam suatu wilayah kota. Trayek pelayanan angkutan kota dipengaruhi oleh data perjalanan, penduduk dan penyebarannya, serta kondisi fisik daerah yang akan dilayani oleh angkutan kota<sup>70</sup>.

Umumnya dalam suatu wilayah kota terdapat beberapa buah trayek dimana masing-masing trayek mempunyai rute tersendiri yang harus dilewati oleh angkutan kota. Sistem jaringan rute di perkotaan biasanya terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

- Jaringan yang terbentuk secara evolusi yang pembentukannya dimuali oleh pihak-pihak pengelola secara sendiri-sendiri
- Jaringan rute yang terbentuk secara menyeluruh, yang dilakukan oleh pengelola angkutan massal secara simultan dan bersama-sama.

**d. Ciri-ciri Pelayanan Trayek Angkutan Kota terdiri dari:**

- a. Mempunyai jadwal tetap
- b. Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalan ulang-alik secara tetap dengan pengangkutan yang bersifat masal
- c. Dilayani oleh mobil bus kecil kapasitas 8 orang
- d. Pelayanan cepat atau lambat
- e. Jarak pendek
- f. Melalui tempat-tempat yang di tetapkan hanya menaikkan dan menurunkan penumpang.

**d. Permasalahan Angkutan Kota**

Keadaan ekonomi yang semakin membaik secara tidak langsung akan meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat sebagai sarana transportasi sehari-

---

<sup>70</sup> Setijowarnon D. Dan Franzila, R.B, *Pengantar Sistem Transportas*(Semarang: Unika Soegijapranata, 2001), 206.

hari, selain itu rendahnya pelayanan angkutan umum juga menjadi salah satu alasan masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi dari pada angkutan umum. Penyediaan jasa angkutan umum yang belum memadai dapat menimbulkan semakin jeleknya citra mereka yang pada akhirnya menyebabkan semakin rendahnya tingkat pemakaian angkutan umum<sup>71</sup>.

Penyediaan pelayanan angkutan umum terdiri dari berbagai jenis keualitas maupun kapasitas, mulai dari kereta api, bus besar, bus sedang, angkot, taksi. Permasalahan utama yang ada dalam penyelenggaraan angkutan umum kenyataannya bahwa sistem jaringan trayek didominasi oleh angkot dan hierarki trayeknya tidak jelas. Beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan angkutan kota di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) Jual beli izin trayek
- 2) Tidak memiliki izin trayek
- 3) Penyimpangan rute
- 4) Tumpang tindih trayek
- 5) Menurunkan penumpang tidak di pinggir jalan
- 6) Pungutan resmi dan tidak resmi
- 7) Konflik dengan trayek angkutan lain
- 8) Konflik dengan ojek dan taksi online

---

<sup>71</sup> Warpani Suwardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), 38.





## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penatafsiran Al Quran, 1971.

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Dar Al-Anshor, Qahirat, 2001.

A.Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedia Tematis dinul Islam*, Bandung: kencana, 2006

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Auntsitas Ideologi dan Agama*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012, cet 2, 3.

Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, Jakarta: Granit, 2004.

Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008.

A.S, Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2001.
- Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kaencana, 2007.
- Elvinaro Ardianto, *Metodelogi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Haizar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Referensi Perpustakaan, 2013.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, 2003.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibnu Syarif, Muzar Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al Ra'iyah*, Dar Al-Kutub Al Arabiyah, Beirut, 2003.
- Ibnu Syarif, Muzar Dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Junaiyah H.M Dan E. Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- M. Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Moh. Pembundu Tika, *Metodelogi Riset Bisni*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar''Iyat*, Dar Al-Anshor, Qahirat, 2001.

Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008

Napitupulu, *Seri Ilmu Pemerintahan: Menakar Urgensi Otonomi Daerah: Solusi Atas Ancaman Disintegrasi*, Jakarta: Alumni, 2007.

Nasution, M. Nur. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Pius Abdillah Dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2009.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002,

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013

Ratminto Dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sakti Adji Sasmita. *Transportasi Komprehensif Dan Multimoda*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

Setijowarnon D. Dan Franzila, R.B, *Pengantar Sistem Transportas*, Semarang: Unika Soegijapranata, 2001

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Sirajuddin *Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Shaddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Siyasah Syar''Iyyah*, Yogyakarta: Madah, 2003.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Refika Aditama, 2010.
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB Bandung, 2002.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Susiadi As. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Tjandra, *7 Prinsip Sukses Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar''Iyat Fi Islah Al Ra''Iyat, Dar Al-Kutub Al Arabiyat*, Beirut, 2003.
- Warpani Suwardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002
- Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2001
- Widodo, Joko. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang: Citra Malang, 2001.
- Wynd Rizaldi, Muhammad Rifni, Dan Dkk, *Manajemen Multimoda Transportation Dan Freight Forwarder*, Bogor: In Media, 2014.

### **C. Artikel Jurnal**

Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi, 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition. Internasional Journal of Business and Sosial Science. Vol. 3 No. 20.*

Ludfi Djakfar, “Jurnal Teknik sipil Vol. IV, No. 1, April 2015.

Muhammad Syaiful Buamona, “Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate” Jurnal unsrat, Vol 2, No 3, 2005

N. Rahma, “Peranan Dinas Perhubungan. Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat” Jurnal *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, 2019

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Trayek Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan

### **E. On-Line Informasi Via Internet**

On-line tersedia di [bps.go.id](https://bps.go.id). Diakses pada 28 September 2020, Pukul: 19:35 WIB.